



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.870.229.932.401,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.878.229.932.401,00</u>	
<i>Surplus/(Defisit)</i>		(Rp8.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp11.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	<u>Rp3.000.000.000,00</u>	
<i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>		<u>Rp8.000.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp225.113.526.688,00
b. Dana Perimbangan	Rp1.296.754.576.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp348.361.829.713,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a. Pajak Daerah	Rp105.329.340.500,00
b. Retribusi Daerah	Rp30.329.500.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp2.600.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp86.854.686.188,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:	
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp132.822.462.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp912.719.353.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp251.212.761.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	Rp66.454.481.500,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp44.570.076.213,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp237.337.272.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp1.249.247.428.624,00
b. Belanja Langsung	Rp628.982.503.777,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a. Belanja Pegawai	Rp794.081.450.316,00
b. Belanja Bunga	Rp0,00
c. Belanja Subsidi	Rp404.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp89.986.205.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp7.092.943.747,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp13.565.884.050,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp342.616.945.511,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp1.500.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp47.745.446.000,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp408.146.791.489,00 |
| c. Belanja Modal | Rp173.090.266.288,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- | | |
|----------------|---------------------|
| a. Penerimaan | Rp11.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp3.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | Rp10.000.000.000,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp1.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | Rp2.000.000.000,00 |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp1.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berkenaan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati sebagai landasan operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGGAI


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 123.04/2019



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.870.229.932.401,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225.113.526.688,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	105.329.340.500,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.329.500.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.854.686.188,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.296.754.576.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	132.822.462.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	912.719.353.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	251.212.761.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	348.361.829.713,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	66.454.481.500,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.570.076.213,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	237.337.272.000,00
2	BELANJA	1.878.229.932.401,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.249.247.428.624,00
2.1.1	Belanja Pegawai	794.081.450.316,00
2.1.3	Belanja Subsidi	404.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	89.986.205.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.092.943.747,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.565.884.050,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	342.616.945.511,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	628.982.503.777,00
2.2.1	Belanja Pegawai	47.745.446.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	408.146.791.489,00
2.2.3	Belanja Modal	173.090.266.288,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.000.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI BANGGAI

HERWIN YATIM



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA		JUMLAH BELANJA
		3	4		5	6		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG				
1	2							
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	94.632.186.188,00	508.088.061.901,00	403.286.128.032,00	911.374.189.933,00			
1.01	Pendidikan	0,00	367.003.358.463,00	81.240.173.000,00	448.243.531.463,00			
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	367.003.358.463,00	81.240.173.000,00	448.243.531.463,00			
1.02	Kesehatan	88.434.686.188,00	99.135.053.353,00	223.969.666.660,00	323.104.720.013,00			
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	25.289.160.028,00	64.229.713.406,00	130.463.255.500,00	194.692.968.906,00			
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	63.145.526.160,00	34.905.339.947,00	93.506.411.160,00	128.411.751.107,00			
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.747.500.000,00	17.019.426.497,00	71.399.754.000,00	88.419.180.497,00			
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.747.500.000,00	17.019.426.497,00	71.399.754.000,00	88.419.180.497,00			
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	5.729.155.808,00	8.306.258.449,00	14.035.414.257,00			
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	50.000.000,00	5.729.155.808,00	8.042.175.800,00	13.771.331.608,00			
1.04 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	264.082.649,00	264.082.649,00			
1.05	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	400.000.000,00	11.303.039.742,00	9.159.448.771,00	20.462.488.513,00			
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	400.000.000,00	8.182.588.169,00	6.471.882.771,00	14.654.470.940,00			
1.05 . 1.05.02	BADAN KESBANG	0,00	3.120.451.573,00	2.687.566.000,00	5.808.017.573,00			
1.06	Sosial	0,00	7.898.028.038,00	9.210.827.152,00	17.108.855.190,00			
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	4.729.737.481,00	7.211.137.000,00	11.940.874.481,00			
1.06 . 1.06.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	3.168.290.557,00	1.999.690.152,00	5.167.980.709,00			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	10.107.000.000,00	56.211.693.839,00	56.822.413.097,00	113.034.106.936,00			
2.01	Tenaga Kerja	200.000.000,00	4.273.080.957,00	1.848.897.350,00	6.121.978.307,00			
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	4.273.080.957,00	1.848.897.350,00	6.121.978.307,00			
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	6.612.593.545,00	2.660.089.705,00	9.272.683.250,00			
2.02 . 2.02.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.612.593.545,00	2.660.089.705,00	9.272.683.250,00			
2.03	Pangan	0,00	3.708.266.552,00	1.383.734.850,00	5.092.001.402,00			
2.03 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	3.708.266.552,00	1.383.734.850,00	5.092.001.402,00			
2.04	Pertanian	0,00	0,00	424.108.000,00	424.108.000,00			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	424.108.000,00	424.108.000,00
2.05	Lingkungan Hidup	4.007.000.000,00	6.121.536.950,00	15.913.696.504,00	22.035.233.454,00
2.05 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.05 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	3.162.806.000,00	3.162.806.000,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.007.000.000,00	6.121.536.950,00	12.615.890.504,00	18.737.427.454,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	4.466.549.858,00	3.640.147.700,00	8.106.697.558,00
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.466.549.858,00	3.640.147.700,00	8.106.697.558,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.135.526.896,00	2.682.593.655,00	7.818.120.551,00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.135.526.896,00	2.682.593.655,00	7.818.120.551,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	8.170.711.500,00	8.170.711.500,00
2.08 . 2.02.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	8.170.711.500,00	8.170.711.500,00
2.09	Perhubungan	5.000.000.000,00	5.629.125.647,00	3.138.136.182,00	8.767.261.829,00
2.09 . 2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	5.000.000.000,00	5.629.125.647,00	3.138.136.182,00	8.767.261.829,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	750.000.000,00	4.839.491.664,00	4.556.466.443,00	9.395.958.107,00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	750.000.000,00	4.839.491.664,00	2.766.555.500,00	7.606.047.164,00
2.10 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	1.789.910.943,00	1.789.910.943,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	3.227.388.606,00	2.083.866.708,00	5.311.255.314,00
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	3.227.388.606,00	2.083.866.708,00	5.311.255.314,00
2.12	Penanaman Modal	150.000.000,00	4.874.637.471,00	2.970.000.000,00	7.844.637.471,00
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	150.000.000,00	4.874.637.471,00	2.970.000.000,00	7.844.637.471,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	3.814.998.886,00	3.446.270.000,00	7.261.268.886,00
2.13 . 2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	3.814.998.886,00	3.446.270.000,00	7.261.268.886,00
2.14	Statistik	0,00	0,00	252.495.000,00	252.495.000,00
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	77.245.000,00	77.245.000,00
2.14 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	175.250.000,00	175.250.000,00
2.15	Persandian	0,00	0,00	156.199.500,00	156.199.500,00
2.15 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	156.199.500,00	156.199.500,00
2.16	Kebudayaan	0,00	0,00	1.795.000.000,00	1.795.000.000,00
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	1.795.000.000,00	1.795.000.000,00
2.17	Perpustakaan	0,00	3.508.496.807,00	1.597.157.000,00	5.105.653.807,00
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	3.508.496.807,00	1.597.157.000,00	5.105.653.807,00
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	102.843.000,00	102.843.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	
			3	4	5	6
1	2					
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	102.843.000,00	102.843.000,00	
3	Urusan Pilihan	7.015.000.000,00	44.416.003.222,00	39.608.308.770,00	84.024.311.992,00	
3.01	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.01 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.02	Kehutanan	0,00	0,00	39.269.000,00	39.269.000,00	
3.02 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	39.269.000,00	39.269.000,00	
3.03	Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000,00	3.905.406.182,00	5.906.000.000,00	9.811.406.182,00	
3.03 . 3.03.01	DINAS PERIKANAN	1.000.000.000,00	3.905.406.182,00	5.906.000.000,00	9.811.406.182,00	
3.04	Pariwisata	150.000.000,00	4.574.329.652,00	2.969.692.000,00	7.544.021.652,00	
3.04 . 3.04.01	DINAS PARIWISATA	150.000.000,00	4.574.329.652,00	2.969.692.000,00	7.544.021.652,00	
3.05	Pertanian	500.000.000,00	29.618.673.032,00	26.141.842.620,00	55.760.515.652,00	
3.05 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	0,00	1.968.765.150,00	1.968.765.150,00	
3.05 . 3.05.01	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0,00	22.072.124.459,00	19.377.077.470,00	41.449.201.929,00	
3.05 . 3.05.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	500.000.000,00	7.546.548.573,00	4.796.000.000,00	12.342.548.573,00	
3.06	Perdagangan	5.365.000.000,00	6.317.594.356,00	2.525.410.500,00	8.843.004.856,00	
3.06 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	5.365.000.000,00	6.317.594.356,00	2.525.410.500,00	8.843.004.856,00	
3.07	Perindustrian	0,00	0,00	1.359.589.500,00	1.359.589.500,00	
3.07 . 3.06.01	DINAS PERDAGANGAN	0,00	0,00	1.359.589.500,00	1.359.589.500,00	
3.08	Transmigrasi	0,00	0,00	626.505.150,00	626.505.150,00	
3.08 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	0,00	626.505.150,00	626.505.150,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.758.475.746.213,00	640.531.669.662,00	129.265.653.878,00	769.797.323.540,00	
4.01	Administrasi Pemerintahan	800.000.000,00	140.543.062.322,00	101.878.160.976,22	242.421.223.298,22	
4.01 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00	25.217.212.654,00	0,00	25.217.212.654,00	
4.01 . 4.01.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00	781.189.218,00	0,00	781.189.218,00	
4.01 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	800.000.000,00	27.005.921.280,00	34.667.914.057,00	61.673.835.337,00	
4.01 . 4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	4.416.514.333,00	26.000.000.000,00	30.416.514.333,00	
4.01 . 4.01.05	KECAMATAN NUHON	0,00	2.666.177.883,00	550.000.000,00	3.216.177.883,00	
4.01 . 4.01.06	KECAMATAN BUNTA	0,00	4.677.348.294,00	2.563.285.200,00	7.240.633.494,00	
4.01 . 4.01.07	KECAMATAN PAGIMANA	0,00	5.759.305.361,00	2.318.000.000,00	8.077.305.361,00	
4.01 . 4.01.08	KECAMATAN BUALEMO	0,00	2.307.129.172,00	575.000.000,00	2.882.129.172,00	
4.01 . 4.01.09	KECAMATAN BALANTAK	0,00	3.890.455.518,00	2.028.000.000,00	5.918.455.518,00	
4.01 . 4.01.10	KECAMATAN LAMALA	0,00	2.602.260.182,00	455.000.000,00	3.057.260.182,00	
4.01 . 4.01.11	KECAMATAN MASAMA	0,00	2.251.055.477,00	455.000.000,00	2.706.055.477,00	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA		
			1	2	3		LANGSUNG	
							4	5
4.01 . 4.01.12	KECAMATAN LUWUK TIMUR	0,00	2.500.137.619,00	550.000.000,00	3.050.137.619,00			
4.01 . 4.01.13	KECAMATAN LUWUK	0,00	8.841.871.313,00	5.073.000.000,00	13.914.871.313,00			
4.01 . 4.01.14	KECAMATAN KINTOM	0,00	4.403.874.469,00	2.023.000.000,00	6.426.874.469,00			
4.01 . 4.01.15	KECAMATAN BATUI	0,00	5.186.303.022,00	4.262.000.000,00	9.448.303.022,00			
4.01 . 4.01.16	KECAMATAN TOILI	0,00	3.316.923.523,00	1.086.000.000,00	4.402.923.523,00			
4.01 . 4.01.17	KECAMATAN TOILI BARAT	0,00	2.748.926.488,00	520.000.000,00	3.268.926.488,00			
4.01 . 4.01.18	KECAMATAN SIMPANG RAYA	0,00	1.967.523.782,00	500.000.000,00	2.467.523.782,00			
4.01 . 4.01.19	KECAMATAN LOBU	0,00	1.412.972.991,00	480.000.000,00	1.892.972.991,00			
4.01 . 4.01.20	KECAMATAN MOILONG	0,00	2.273.197.066,00	520.000.000,00	2.793.197.066,00			
4.01 . 4.01.21	KECAMATAN BATUI SELATAN	0,00	1.795.088.508,00	520.000.000,00	2.315.088.508,00			
4.01 . 4.01.22	KECAMATAN BALANTAK SELATAN	0,00	1.603.155.684,00	500.000.000,00	2.103.155.684,00			
4.01 . 4.01.23	KECAMATAN NAMBO	0,00	5.548.755.777,00	3.626.000.000,00	9.174.755.777,00			
4.01 . 4.01.24	KECAMATAN LUWUK SELATAN	0,00	9.746.775.129,00	5.313.324.219,22	15.060.099.348,22			
4.01 . 4.01.25	KECAMATAN LUWUK UTARA	0,00	4.237.644.581,00	1.702.000.000,00	5.939.644.581,00			
4.01 . 4.01.26	KECAMATAN BALANTAK UTARA	0,00	1.313.294.031,00	480.000.000,00	1.793.294.031,00			
4.01 . 4.01.27	KECAMATAN MANTOH	0,00	2.072.048.967,00	455.000.000,00	2.527.048.967,00			
4.01 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	4.630.637.500,00	4.630.637.500,00			
4.02	Pengawasan	0,00	6.165.898.496,00	2.953.511.419,78	9.119.409.915,78			
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	6.165.898.496,00	2.953.511.419,78	9.119.409.915,78			
4.03	Perencanaan	0,00	7.781.145.632,00	4.885.316.132,00	12.666.461.764,00			
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	7.781.145.632,00	4.885.316.132,00	12.666.461.764,00			
4.04	Kuangan	1.757.675.746.213,00	481.510.623.521,00	15.788.075.350,00	497.298.698.871,00			
4.04 . 4.04.01	BADAN PENDAPATAN DAERAH	105.329.340.500,00	13.599.727.137,00	9.387.675.350,00	22.987.402.487,00			
4.04 . 4.04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.652.346.405.713,00	467.910.896.384,00	6.400.400.000,00	474.311.296.384,00			
4.05	Kepegawaian	0,00	4.530.939.691,00	3.540.590.000,00	8.071.529.691,00			
4.05 . 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	264.480.000,00	264.480.000,00			
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	4.530.939.691,00	3.276.110.000,00	7.807.049.691,00			
4.07	Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00			
4.07 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00			
JUMLAH			1.249.247.428.624,00	628.982.503.777,00	1.878.229.932.401,00			
SURPLUS / (DEFISIT)			(8.000.000.000,00)					

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	11.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
4.04	Keuangan	11.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

BUPATI BANGGAI



HERWIN YATIM